



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 1027/BD.07.03/P.01/B/08/2022 19 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Seleksi Program Beasiswa *Split-Site Master's Program (SSMP)*
Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
 2. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
- (Daftar terlampir)

Peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) sangat penting dalam mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023. Program beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2023 meliputi program beasiswa *Split-Site Master's Program (SSMP)* kerja sama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI).

Calon peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 **diharuskan mendaftar melalui** situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut.**

Proses seleksi program Beasiswa SSMP Tahun 2023 meliputi tahapan seleksi administrasi, tes potensi akademik (TPA), dan *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* serta akan ada penambahan proses seleksi, berupa tes IELTS dan wawancara oleh *Joint Selection Team (JST)* AAI. Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan SSMP Tahun 2023), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 15 Oktober 2022 (cap pos).**

Dokumen...



Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Perlu kami informasikan juga bahwa apabila dalam kegiatan ini terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai Pusbindiklatren, Saudara dapat melaporkan tindakan tersebut ke surel pusbindiklatren@bappenas.go.id atau Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dengan dilengkapi bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya).

Program Beasiswa *Split-Site Master's Program* (SSMP) merupakan program yang diselenggarakan di salah satu universitas di Indonesia dan salah satu universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Australia, serta berhak mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Split-Site Master's Program* (SSMP) diselenggarakan di tiga program studi di Indonesia, yakni Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung kerja sama dengan Master of International Sustainable Tourism Management, Monash University, Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada kerja sama dengan Master of Social Policy University of Melbourne, dan Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga kerja sama dengan Master of Global Public Health, Griffith University;
- Setelah memenuhi syarat TPA, TOEFL dan wawancara tertulis, peserta akan mengikuti proses wawancara *Australia Awards in Indonesia* (AAI) dan tes IELTS pada bulan **Maret-April 2023 (tentatif)**;

Pada...



- Pada tahun pertama, karyasiswa yang terpilih mengikuti *Split-Site Master's Program* (SSMP) akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Indonesia dengan menggunakan sumber dana beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti kursus persiapan Bahasa Inggris di IALF yang akan dibiayai oleh pihak *Australia Awards in Indonesia* (AAI). Pada tahun kedua, karyasiswa akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Australia dengan menggunakan sumber dana *Australia Awards in Indonesia* (AAI);

Jadwal Seleksi Program Beasiswa *Split-Site Master's Program* (SSMP) Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	PROGRAM	WAKTU
1	Batas Akhir Pendaftaran Peserta Program <i>Split-Site Master's Program</i> (SSMP) Tahun 2023	15 Oktober 2022
2	Seleksi Nasional TPA dan TOEFL <i>Split-Site Master's Program</i> (SSMP) Tahun 2023	November 2022
3	Pemanggilan Peserta Ujian IELTS dan Wawancara <i>Split-Site Master's Program</i> (SSMP) Tahun 2023	Maret-April 2023

*Keterangan : Jika ada perubahan jadwal, akan diinformasikan kemudian.

Panduan Pelaksanaan Program *Split-Site Master's Program* (SSMP) Tahun 2023 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Tim Penyelenggaraan Pendidikan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.



Lampiran 1 : Daftar Undangan
Nomor : 1027/BD.07.03/P.01/B/08/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

DAFTAR UNDANGAN

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
26. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
27. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
28. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
29. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
30. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
32. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
33. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

34. Kejaksaan Agung
35. Kementerian Agama
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
38. Kementerian Dalam Negeri
39. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
40. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
41. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Kesehatan
44. Kementerian Ketenagakerjaan
45. Kementerian Komunikasi dan Informatika
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
47. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
50. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
51. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52. Kementerian Luar Negeri
53. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
54. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
56. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
57. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
58. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
61. Kementerian Perhubungan
62. Kementerian Perindustrian
63. Kementerian Pertahanan
64. Kementerian Pertanian
65. Kementerian Sekretariat Negara
66. Kementerian Sosial
67. Kepolisian Republik Indonesia
68. Komisi Aparatur Sipil Negara
69. Komisi Pemilihan Umum
70. Komisi Yudisial
71. Mahkamah Agung
72. Mahkamah Konstitusi

73. Ombudsman Republik Indonesia
74. Perpustakaan Nasional
75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Kabinet
77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
78. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
79. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat



- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis

- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu



8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro



11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara



14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang

- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan

17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak

- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan

- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton

- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi

- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Toikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yulimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu salah satu peran Kementerian PPN/Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) yang berkualitas tersebut maka salah satu sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas adalah tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aparatur pemerintah yang bekerja di badan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyiapkan, merumuskan, dan menyusun, serta melakukan pemantauan rencana pembangunan baik di instansi pusat dan daerah. Peningkatan kualitas ASN perencana diarahkan tidak saja hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian perencana, tapi juga diarahkan pada perilaku perencana yang profesional.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas dan Fungsi dalam melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi perencana di pusat dan daerah. Peningkatan kompetensi ASN perencana dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara di berbagai bidang perencanaan pembangunan. Program Pendidikan terdiri dari program S2 di dalam negeri dan luar negeri, program S2 *Linkage* (1 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri), serta S3 baik di dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan fungsinya sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023. Program beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2023 meliputi program beasiswa *Split-Site Master's Program* (SSMP) kerja sama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI).

Tujuan...

Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa Pusbindiklatren Bappenas adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

PROGRAM BEASISWA

Informasi Program Beasiswa Tahun 2023

Dalam pelaksanaan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023, kami menawarkan program beasiswa untuk:

- Program Beasiswa *Split-Site Master's Program* (SSMP) merupakan program yang diselenggarakan di salah satu universitas di Indonesia dan salah satu universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Australia, serta berhak mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Split-Site Master's Program* (SSMP) diselenggarakan di tiga program studi di Indonesia, yakni Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung kerja sama dengan Master of International Sustainable Tourism Management, Monash University, Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada kerja sama dengan Master of Social Policy University of Melbourne, dan Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga kerja sama dengan Master of Global Public Health, Griffith University;
 - Setelah memenuhi syarat TPA, TOEFL dan wawancara tertulis, peserta akan mengikuti proses wawancara *Australia Awards in Indonesia* (AAI) dan tes IELTS pada bulan **Maret-April 2023 (tentatif)**;
 - Pada tahun pertama, karyasiswa yang terpilih mengikuti *Split-Site Master's Program* (SSMP) akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Indonesia dengan menggunakan sumber dana beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti kursus persiapan Bahasa Inggris di IALF yang akan dibiayai oleh pihak *Australia Awards in Indonesia* (AAI). Pada tahun kedua, karyasiswa akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Australia dengan menggunakan sumber dana *Australia Awards in Indonesia* (AAI);

Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

Tabel...



Tabel Persyaratan Beasiswa SSMP Tahun 2023

PERSYARATAN	SSMP
SYARAT ADMINISTRATIF	
Pengusulan Dari Instansi	Eselon II bidang Kepegawaian
Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan
PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun
Strata Pendidikan Min.	S1*
Minimal Tahun Lulus S1	2 Tahun
Umur Maksimal**	37 Tahun**
IPK Minimal	2.9
Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II bidang Kepegawaian
Tes Potensi Akademik (TPA)	
Pusat	565
Pusat Luar Jawa	525
Pemerintah Daerah di Jawa	525
Pemerintah Daerah di Luar Jawa	500
TOEFL Minimal	525
Wawancara Tertulis	Menunjukkan Komitmen

Keterangan :

* Diprioritaskan dengan latar belakang pendidikan S1 yang linear dengan jurusannya.

** Batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun 0 bulan per 1 Agustus 2023

Sehubungan...

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

- a) Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;
- b) Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 62 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	Sumatera Utara	Nias Barat	-
2	Sumatera Utara	Nias Utara	-
3	Sumatera Utara	Nias	-
4	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
7	Lampung	Pesisir Barat	DOB
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
11	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
12	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-
13	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
14	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
15	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
16	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
22	Sulawesi Tengah	Donggala	-
23	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
24	Sulawesi Tengah	Sigi	-
25	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	-
26	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-
27	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	-
28	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	-
29	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	-
30	Maluku	Kab. Buru Selatan	-
31	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	-
32	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	DOB
33	Papua	Keerom	-
34	Papua	Pegunungan Bintang	-
35	Papua	Memberamo Tengah	-
36	Papua	Supiori	-
37	Papua	Waropen	-
38	Papua	Memberamo Raya	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
39	Papua	Asmat	-
40	Papua	Mappi	-
41	Papua	Boven Digoel	-
42	Papua	Nabire	-
43	Papua	Intan Jaya	-
44	Papua	Deiyai	-
45	Papua	Dogiyai	-
46	Papua	Paniai	-
47	Papua	Jayawijaya	-
48	Papua	Lanny Jaya	-
49	Papua	Yalimo	-
50	Papua	Yahukimo	-
51	Papua	Tolikara	-
52	Papua	Puncak	-
53	Papua	Puncak Jaya	-
54	Papua	Nduga	-
55	Papua Barat	Sorong	-
56	Papua Barat	Sorong Selatan	-
57	Papua Barat	Maybrat	-
58	Papua Barat	Tambrauw	-
59	Papua Barat	Manokwari Selatan	-
60	Papua Barat	Pegunungan Arfak	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
61	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
62	Papua Barat	Teluk Wondama	-

*Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di atas.

Pilihan Program Studi SSMP Tahun 2023

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI
1	Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung	<p>Ketua Program Studi : Dr. Drs. Suhirman, SH., MT. Pengelola Akademik : Tarsiwad Link Informasi : https://multisite.itb.ac.id/pariwisata/en/ Alamat : Ged. CRCS Lt. 2, Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132 – Jawa Barat Email : mpk@itb.ac.id Nomor Kontak : +62 812-2178-5106 Jumlah SKS : Persyaratan Masuk Latar Belakang Pendidikan : S1 Syarat Linearitas : TPA Minimal : 475 atau sesuai syarat Beasiswa Pusbindiklatren TOEFL Minimal : 475 IPK Minimal : 2,9 Persyaratan Lainnya : Persyaratan Kelulusan TPA Minimal : 475 TOEFL Minimal : 525 IPK Minimal : Publikasi Ilmiah : Menerapkan kebijakan tersebut dan dapat digantikan dengan bentuk lain seperti seminar atau konferensi nasional. Syarat Yudisium : Lulus Seluruh Mata Kuliah Persyaratan Lainnya :</p>

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI
2	Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada	<p>Ketua Program Studi : Dr. Desintha Dwi Asriani Pengelola Akademik : Dr. M. Falikul Isbah Link Informasi : https://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/ Alamat : Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Email : postgrad.sociology.fisipol@ugm.ac.id Nomor Kontak : +62 812-1191-1367 Jumlah SKS : 46 SKS (UGM) dan 21 SKS (Unimelb)</p> <p>Persyaratan Masuk Latar Belakang Pendidikan : D4 Syarat Linearitas : Rumpun Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Hukum TPA Minimal : 450 atau sesuai syarat Beasiswa Pusbindiklatren TOEFL Minimal : 550 atau IELTS 6 IPK Minimal : 3,00 Persyaratan Lainnya : Ijazah D4 dan S1 dari rumpun sosial, humaniora, ekonomi, hukum</p> <p>Persyaratan Kelulusan TPA Minimal : 450 atau sesuai syarat Beasiswa Pusbindiklatren TOEFL Minimal : TOEFL (paper-based test) 577+ or (internet-based test) 79+, IELTS IELTS score 6.5 (no band less than 6.0) or International IPK Minimal : 3,25 Publikasi Ilmiah : Tidak/belum menjalankan kebijakan tersebut. Syarat Yudisium : Persyaratan Lainnya :</p>

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI
3	Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga	<p>Ketua Program Studi : Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes Pengelola Akademik : Lusianah Link Informasi : https://s2k3.fkm.unair.ac.id Alamat : Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus C UNAIR, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115 Email : s2kkk@fkm.unair.ac.id Nomor Kontak : 0878 5490 0745 Jumlah SKS : 40 SKS di Indonesia</p> <p>Persyaratan Masuk Latar Belakang Pendidikan : S1 Syarat Linearitas : TPA Minimal : Menyesuaian PPMB Universitas Airlangga atau Beasiswa Pusbindiklatren TOEFL Minimal : Menyesuaian PPMB Universitas Airlangga atau Beasiswa Pusbindiklatren IPK Minimal : Menyesuaian PPMB Universitas Airlangga atau Beasiswa Pusbindiklatren Persyaratan Lainnya : Calon mahasiswa dengan latar belakang pendidikan S1 selain SKM minat K3 diwajibkan mengikuti matrikulasi</p> <p>Persyaratan Kelulusan TPA Minimal : - TOEFL Minimal : 475 IPK Minimal : 3,0 Publikasi Ilmiah : Mewajibkan kebijakan tersebut sampai karya ilmiah diterima oleh pihak redaksi (<i>accepted</i>). Syarat Yudisium : Berita Acara Perbaikan (BAP) Ujian Tesis; Skor TOEFL minimal 475 dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga; Sudah mendapatkan LoA minimal jurnal SINTA 4 sebagai <i>first author</i>; Tanda terima tesis dari Perpustakaan; Bukti bebas pinjam dari Perpustakaan maupun ruang baca</p> <p>Persyaratan Lainnya : Melakukan kaji etik penelitian; Menunjukkan hasil plagiasi tesis kurang dari 20%</p>

Prosedur Pelamaran

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;

3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan dan/atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pusbindiklatren telah mengirimkan berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kementerian/Lembaga melalui bagian kepegawaian di masing-masing instansi. Selain itu, kami juga mengunggah berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren pada situs Pusbindiklatren Bappenas di <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>;
5. **Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
7. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
 - b) Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
 - c) Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d) Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
 - e) Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
 - f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
 - g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:



Program S2 *Linkage/Split-Site Master's Program (SSMP)*

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
Tahun Pertama di Indonesia			
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	Program	<i>At Cost Max</i>
2	Tunjangan Hidup (sesuai Zonasi)	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4	Tunjangan Operasional	Bulan	<i>Lump Sum</i>
5	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Program	<i>At Cost Max</i>
6	Biaya Psikotes	Program	<i>At Cost Max</i>
Tahun Kedua di Luar Negeri – Pembiayaan oleh AAI			

*Detail Biaya Dapat Dilihat Dalam Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2022 pada Website Pusbindiklatren Bappenas

Zonasi Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023

NO	KOTA	TUNJANGAN BIAYA HIDUP	TUNJANGAN BUKU	TOTAL TUNJANGAN BIAYA HIDUP	ZONASI
1	Padang	Rp.1.900.000	Rp.200.000	Rp.2.100.000	Zona 1
2	Aceh				
3	Palembang				
4	Yogyakarta				
5	Bandung	Rp.2.300.000	Rp.200.000	Rp.2.500.000	Zona 2
6	Makassar				
7	Malang				
8	Bogor				
9	Semarang				
10	Denpasar				
11	Surabaya	Rp.3.200.000	Rp.200.000	Rp.3.400.000	Zona 3
12	DKI Jakarta				
13	Depok				

Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
 - a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari.

Format Pernyataan Rencana Studi

Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;

Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

Panduan Registrasi *Online*

Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Masukkan NIP Anda lalu  klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu  klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.

5. Lalu klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert* klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukkan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu **Lupa Password:** <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan klik *link Forgot Password*;
5. Jika terdapat peringatan/*Alert* klik OK;
6. Silakan klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan klik UNDUH;

**HANYA DIGUNAKAN
JIKA KESULITAN
REGISTRASI ONLINE**

- 13 -

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

-
1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) :
 2. NIP :
 3. Tempat, Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin : L/P
 4. Alamat Rumah :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 5. Email Address :
 6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) :
 7. Unit Kerja Eselon II/III :
 8. Alamat Kantor :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 - Email Instansi :
 9. Jabatan :
 - Golongan :
 10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
 - Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 - Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :
.....
.....
.....
.....
 - TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 :
 - Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A :

12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1/S2
Perguruan Tinggi :
Fakultas (DIV/S1/S2) :
Jurusan :
Lulus Tahun (DIV/S1/S2) :
IPK : dari

13. Selain beasiswa Pusbindiklatren, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya? Ya/Tidak

14. Pilihan Rencana Studi S2 :

Program SSMP Tahun 2023 → **DIURUTKAN SESUAI PRIORITAS**

1.
2.
3.

15. Tuliskan rencana studi pada program S2/S3 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. Silakan menggunakan kertas tambahan jika diperlukan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Menyetujui, 2022
Yang Bersangkutan,

(Kepala BKD/Kepala Biro SDM) (Materai 10000 Rupiah)
(TTD dan Cap Basah)

(.....) (.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1.
2.
3.

**TIDAK DIWAJIBKAN
MELENGKAPI KELIMA PILIHAN**

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 10.000, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.